**BAB I  
PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia berada pada perubahan yang cukup besar dan mendasar, yaitu menguatnya tuntutan akuntabilitas serta transparansi kinerja terhadap tata kelola sektor publik, dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas serta kinerja finansial pihak pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui sistem pengelolaan keuangan publik yang terkait dalam menciptakan langkah-langkah strategis, mengembangkan, dan penegakan sistem pengelolaan keuangan publik tersebut. Supaya terciptanya tujuan pembangunan daerah yang baik secara khusus serta tujuan berbangsa dan bernegara secara umum.

Upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam cakupan yang sangat luas dan harus tepat waktu serta mematuhi standar akuntansi sektor publik yang telah diterima secara umum. Yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dan Undang-undang nomor 31 tentang perbendaharaan agar kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemerintah Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Audit salah satu alat kontrol bagi pemerintah atas kompleksitas laporan keuangan yang harus disajikan dengan benar dan sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang membutuhkannya. Salah satunya adalah auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar (Boynton dan Kell, 2002). Yaitu biaya yang memadai (*reasonable cost*)dan Jumlah waktu yang memadai (*reasonable length of time*).

Berkaitan dengan hal diatas, Anggit (2007) berpendapat bahwa dalam pelaksanaan audit perlu adanya penyusunan anggaran waktu (*time budget*) yang secara sederhana menetapkan pedoman mengenai jumlah waktu dari masing-masing bagian audit. Anggaran waktu apabila digunakan secara tepat dapat memiliki sejumlah manfaat. Sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak menunda penyajian laporan keuangan. Penundaan ini dapat menyebabkan manfaat informasi menjadi kurang relevan bagi pengguna informasi keuangan terutama investor dalam membuat keputusan investasi dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indoneisa). MP3EI dibagi kedalam enam koridor, yang salah satunya Koridor Ekonomi (KE) pada pulau Sumatera, Jawa, kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Kepulauan Maluku dan Papua. Salah satu kendala di Indonesia adalah aspek *connectivity* antar kawasan. Dalam konteks ini akan dilakukan pembangunan KPI (Kawasan Perhatian Investasi) menurut Hatta Rajasa, dengan tujuan membangun pusat perhatian baru.

Untuk itu, maka perlu pemahaman yang mendalam tentang *audit report lag.* Menurut Wah lai dan Cheuk (2005), *“An audit report lag or audit delay is a period from a company’s year-end date to the audit report date”.* Definisi tersebut selaras dengan Hossain dan Taylor (1998) yang berpendapat “*audit delay has been considered as the time from a company’s accounting year end to the date of the auditor’s report.*” Sedangkan menurut Knechel dan Payne (2001) dalam Hamzah dkk (2005), *audit report lag* / *audit delay* adalah periode waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Oleh karena itu, semakin lama auditor dalam meyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin panjang *audit report lag*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan lebih bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan dan kerahasiaan informasi laporan keuangan tidak bocor kepada pihak lain yang bukan kompetensinya untuk ikut mempengaruhi namun informasi akan kehilangan manfaatnya bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Dalam penelitian ini dilihat dari lamanya penyelesaian audit oleh BPK, dimana dalam ketentuannya BPK wajib melaporkan hasil audit kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun berakhir. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Adapun fenomena yang terjadi di Indonesia, pertama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan NTT (Nusa Tenggara Timur) mendesak pemerintah kabupaten/kota di NTT untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan yang telah diterimanya, Kepala BPK Perwakilan NTT Bernardus Dwita Pradana mengatakan, opini *disclaimer* yang diperoleh kabupaten Rote Ndao selama tiga tahun beruturut-turut adalah ketidakmampuan kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Kedua, pemerintah provinsi Banten terlambat dua bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2012. Menurut Suhada S.Sos, selaku direktur eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) ketidaktaatan terhadap aturan dan undang-undang yang dilakukan oleh Pemprov dan DPRD Banten akan berdampak terlambatnya penetapan APBD Perubahan 2013. Selanjutnya pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi terganggu. Menurut *Crain and Bean*, (1998) dalam *Payne* (2002), melaporkan bahwa dalam serangkaian sesi diskusi kelompok yang dilakukan selama tahun 1995-1996 oleh GASB (*Governmental Accounting Standards Board*), keluhan utama perwakilan dari pasar kredit adalah bahwa *audit delay* kota telah menjadi masalah serius bagi pengguna laporang keuangan. *Dwyer* *and Wilson* (1989) melakukan penelitian terhadap 142 pemerintah kota dengan tahun pajak 1982 adapun hasil penelitiannya yang mempengaruhi *audit delay* adalah tanggung jawab auditor terhadap hasil laporan keuangan, indenpendensi auditor melakukan audit, statemen akuntansi yang spesifik atau pelaporan regulasi prinsip keuangan lainnya dan partisipasi gabungan pegawai negeri keuangan pemda pada program sertifikat. Penelitian Payne dan Jensen (2002), bentuk manajer kota pemerintahan yang profesional dan memiliki sertifikat GFOA (*Government Finance Officers Association*) tentang *award* atas keunggulan dalam membuat laporan keuangan secara signifikan mengurangi *audit delay* dan *Audit delay* secara signifikan meningkat karakteristik kota seperti ukuran kota yang terdiri dari kota besar dan kota kecil. Dan penerimaan opini audit berkualitas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian Andrew and Gary (2000), manager kota yang memiliki *Certificat Accounting* (CA) dijadikan ukuran pelaporan keunggulan dalam melaporkan informasi keuangan yang tepat waktu dan hasilnya berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan. Opini audit juga berpengaruh terhadap waktu audit.

Dari pembahasan diatas, penelitian tentang *Audit Report lag* masih terkonsentrasi pada sektor swasta/perusahaan sehingga sangat terbatas penelitian yang menggunakan pemerintah daerah sebagai objek penelitian. Dan penelitian terdahulu mengenai manager kota/walikota dilihat dari profesionalitas seorang manager yang telah memiliki sertifikat akuntansi dan mendapat award sedangkan penelitian ini dilihat dari latar belakang pendidikan Kepala daerah. Maka peneliti termotivasi untuk menguji beberapa faktor yang mempengaruhi *audit report lag* di kepulauan Sumatera terkait MP3EI. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh latar belakang pendidikan Kepala daerah, ukuran pemerintah daerah dan opini audit terhadap *audit report lag.*

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi penulis yang berjudul “**PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEPALA DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN OPINI AUDIT TERHADAP *AUDIT REPORT LAG***”

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh latar belakang pendidikan kepala daerah terhadap *audit report lag* pemerintah daerah/pemerintah kota pulau Sumatera?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *audit report lag* pemerintah daerah/pemerintah kota pulau Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap *audit report lag* pemerintah daerah/pemerintah kota pulau Sumatera?
   1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris tentang:

1. Pengaruh latar belakang pendidikan kepala daerah terhadap *audit report lag* pemerintah daerah/pemerintah kota pulau Sumatera.
2. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *audit report lag* pemerintah daerah/pemerintah kota Sumatera.
3. Pengaruh opini audit terhadap *audit report lag* pemerintah daerah/pemerintah kota pulau Sumatera.
   1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

* + - 1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh latar belakang pendidikan kepala daerah, pengaruh ukuran pemerintah daerah, dan pengaruh opini audit terhadap *audit report lag* pemerintah daerah/pemerintah kota pulau Sumatera.
      2. Diharapkan dapat membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja auditnya dengan cara mengidentifikasi pengaruh pengaruh latar belakang pendidikan kepala daearah, pengaruh ukuran pemerintah daerah, dan pengaruh opini audit terhadap *audit report lag* pemerintah daerah/pemerintah kota pulau Sumatera sehingga *audit report lag* dapat ditekan seminimal mungkin dalam upaya memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penyampaian laporan keuangan kepada publik.
      3. Sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
  1. **Sistematika Penulisan**

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen, analisis data dan interprestasi terhadap hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, serta saran yang dapat disampaikan untuk penelitian yang akan datang mengenai *audit report lag* pemerintah daerah.